

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

3

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Transfer DBH Terdampak Defisit Anggaran Masa Lalu

PEMERINTAH Provinsi Lampung berharap kepada pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan mengelola pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal dan tidak bertumpu pada dana bagi hasil (DBH) Provinsi. “Mengingat DBH provinsi hanya berkontribusi paling besar 10% dari total pendapatan kabupaten/kota,” kata Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menanggapi pertanyaan Pemkot Bandar Lampung ihwal DBH 2023, Rabu (3/1).

Menurut dia, penyaluran DBH tidak dapat langsung dianggarkan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini merupakan dampak atas defisitnya anggaran pada 2019. “Meskipun demikian, kami konsisten menyalurkan DBH empat triwulan di tiap tahunnya,” kata dia.

Sekprov mengatakan pada 2023 pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun untuk pembayaran DBH yang disalurkan ke 15 kabupaten/kota. “Dampak masa lalu, pada 2019, kami defisit anggaran Rp1,7 triliun, atas kerja keras kita semua sudah terselesaikan. Lalu, pada 2023, sudah tersalurkan 4 triwulan DBH dan 3 triwulan pajak rokok. Totalnya 1,2 triliun,” ujarnya.

Pasalnya, APBD Provinsi Lampung harus merealisasikan belanja wajib yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti belanja wajib infrastruktur 40%, belanja pendidikan minimal 20%, dan belanja wajib kesehatan minimal 10%.

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung menagih DBH provinsi di 2023 yang belum disalurkan penuh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, mengatakan seharusnya mekanisme DBH dibayar setiap per triwulan oleh Pemprov Lampung.

“Namun, Pemprov Lampung membayarkan hanya pada triwulan I 2023. Itu pun tidak penuh, hanya sekitar Rp24 miliar,” kata dia, kemarin.

Ia mengatakan sumber DBH berasal dari pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan, dan pemanfaatan air permukaan. “Kenapa mereka belum membayarkan ini, tak ada alasannya. Namun, mereka bilang Pemprov Lampung butuh uang untuk pembangunan, tetapi kan hal yang sama diperlukan oleh kabupaten dan kota, terkait peruntukan DBH,” ujar dia.

Menurut dia, DBH 2023 untuk triwulan II, III, dan IV yang belum sama sekali dibayarkan sehingga bentuknya terutang. “Ini sama saja seperti pada 2022, mereka membayar DBH ke kami Rp124 miliar. Termasuk itu untuk DBH triwulan I yang nilainya Rp24 miliar,” ujarnya. (CR1/CR3/K1)

1/3